

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2013.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djaja S Mliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Erwin Kallo, *Perspektif hukum dalam dunia properti, Cetakan kedua*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2008.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, edisi 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunanegara, *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2008.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek - Aspek Hukum Perikatan Kredit Perbankan*, Bandung; PT. Citra Aditya bakti, 1996.
- H. Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- H. Salim. HS, *Hukum Jaminan di Indonesia*, edisi-1, cetakan-7, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan -2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- H.M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Huda, NI' Matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UI Press, 2005.
- Irma Devita Purnamasari, *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak mengatasi masalah Hukum Pertanahan*, Cetakan Ketiga, Bandung; Kaifa, 2012.
- Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah beserta Perizinannya*, Yogyakarta, Cetakan Ke-1, Buku Pintar, 2015.
- J. Andy Hartanto, *Paduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Alumni, 2010.
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, cetakan-1, Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, Edisi 1, 2012.
- Maria S.W,dkk, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Legal Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta: Kencana, 2008.

Purno Murtopo, *Teliti Aspek Pajaknya sebelum berinvestasi properti, Cetakan Pertama*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.

R. Subekti, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Sudaryat, *Profesi Legal Officer*, cetakan. 1, Bandung: Oase Media, 2013.

Supriadi, *Hukum Agraria, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-1, 2015.

B. Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, *Undang – Undang Dasar 1945*.

Indonesia., *Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, LNRI No.42 Tahun 1996, TLNRI No. 3632.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI No.104 Tahun 1960, TLNRI No. 2043.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.*

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikata Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan beserta Perubahannya,

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, Pasal 104 butir 1 dan 2.

Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN. Krg.